

**MODEL KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DAN
MASYARAKAT**

**(Studi Kualitatif Komunikasi Aparat Pemerintah
Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Sosial dalam Bidang Ilmu Komunikasi**



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K D-2009 016 KOM	No REG : D-2009/KOM/016
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

**KHISNA AZIZAH
BO6304030**

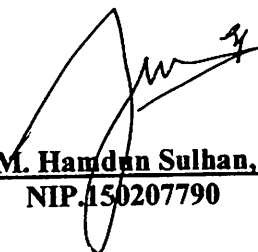
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
FAKULTAS DAKWAH
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
JANUARI 2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh **Khisna Azizah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 15 Januari 2009

Pembimbing


Drs. M. Hamdan Sulhan, Msi
NIP.150207790

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh **Khisna Azizah** ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

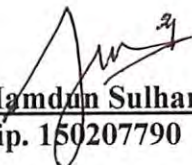
Surabaya, 06 Februari 2009

Mengesahkan
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Dakwah
Dekan



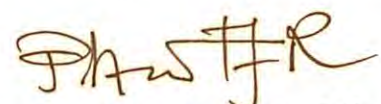
Prof. Dr. H. Shonhadji Sholeh, Dip. IS
Nip. 150194059

Ketua,



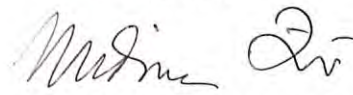
Drs. M. Hamdan Sulhan, M.Si
Nip. 150207790

Sekretaris,




Dra. Pudji Rahmawati, M.Kes
Nip. 150267229

Penguji I,



Drs. H. M. Nadhim Zuhdi, MM
Nip. 150152383

Penguji II,



Drs. H. Soenarto As, M.Ei
Nip. 150246741

fungsi-fungsi Negara” kepada beberapa organ atau struktur pemerintahan.

Pemusatan fungsi-fungsi Negara pada satu struktur biasanya ditemui pada seorang dictator atau kerajaan absolute ketika semua tugas dan kewenangan Negara dipegang dengan satu tangan. Pemegangnya dapat saja menugaskan beberapa fungsinya secara vertical ke bawah, tetapi semua bagian dibawahnya tunduk dan bertanggung jawab kepada organ yang satu.

Pemencaran fungsi-fungsi Negara dapat berwujud “pembagian fungsi” dan dapat berupa “pemisahan fungsi”. Pembagian fungsi Negara berarti pemencaran fungsi Negara pada berbagai struktur pemerintahan yang satu dan yang lain mempunyai fungsi hubungan sederajat, tidak saling membawahkan, tetapi berhubungan secara fungsional dalam usaha bersama mencapai tujuan Negara. Lalu pemisahan fungsi Negara berarti pemencaran fungsi Negara kepada beberapa struktur pemerintahan yang satu sama lain terpisah dan berdiri sendiri, tetapi yang satu melakukan control terhadap yang lain sebagai pengimbang (*check and balance*).

Di samping itu, pemencaran fungsi Negara dapat dilakukan secara horizontal maupun vertical. Kedua bentuk pemencaran fungsi Negara di atas pada dasarnya merupakan pemencaran secara horizontal, atau acapkali disebut pemencaran secara fungsional (pembagian kekuasaan).

Salah satu struktur pemerintahan yang mendapatkan fungsi itu dalam rangka pembagian maupun pemisahan mungkin mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangannya kepada daerah tingkat yang lebih rendah. Hal ini dinamakan pemencaran secara territorial (pembagian kekuasaan secara teritorial).

Pemencaran fungsi Negara secara territorial dibedakan menjadi tiga, yaitu sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi. Dalam asas sentralisasi, pemerintah local yang menerima tugas dan kewenangan Negara merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Oleh karena itu, bertanggung jawab penuh kepada pemerintah pusat. Apabila pemerintah local yang menerima tugas dan kewenangan Negara itu, selain tetap tunduk dan bertanggung jawab kepada pelaksanaan tugas dan kewenangan (sesuai dengan karakteristik daerah) maka pemencaran fungsi ini disebut dekonsentrasi. Lalu yang dimaksud dengan desentralisasi ialah pemencaran fungsi Negara (otonomi). Pemerintah lokal yang memiliki otonomi ini menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang secara terinci diserahkan oleh pemerintah pusat, tetapi ia tidak bertanggung jawab kepada pemerintahan pusat. Karena fungsi itu berasal dari pemerintah pusat maka pemerintah pusat dengan

Sebagaimana telah disebutkan di awal pembahasan ini bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Model Komunikasi Pemerintahan dan Masyarakat (Studi di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri).

Penelitian tentang Model komunikasi tersebut juga pernah dilakukan oleh Khoiru Nikmah Nim BO60302052 mahasiswa IAIN sunan Ampel Fakultas Dakwah Program Studi Ilmu Komunikasi tahun 2006, namun disini tentunya ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini.

Pada penelitian terdahulu mahasiswi tersebut mengangkat judul Model-model Komunikasi di Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadi'-AAT LIRBOYO KEDIRI, sedangkan dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul Model Komunikasi Pemerintahan dan masyarakat. Pada masing-masing penelitian tersebut, penelitian terdahulu mengambil obyek pada hubungan Kiai Santri, Pengasuh dengan Santri di PP Putri Hidayatul Mubtadi' sedangkan penelitian yang peneliti lakukan saat ini obyek yang menjadi kajiannya adalah Aparat Pemerintah Kecamatan dalam penyampaian program kerja pada perangkat desa kemudian diterapkan dalam masyarakat.

Persamaanya adalah penelitian ini mengungkap model komunikasi yang terjadi antar manusia, perbedaannya penelitian terdahulu focus masalah terjadi di lingkungan pondok pesantren, sedang peneliti dalam penelitian ini berusaha menemukan bentuk-bentuk kongkrit (nyata)

Table 1

Daftar Informan Aparat Pemerintah dan Masyarakat

NO	Nama	Umur	Pekerjaan	Lama Bekerja	Jabatan
1	M. Nizam, S.Sos	33 th	Perangkat Kecamatan	8 th	Sekretaris Camat
2.	Subur W, S.Stp	32 th	Perangkat Kecamatan	7 th	Seksi Pemerintahan
3	Susiani	43 th	Perangkat Desa	9 th	Kepala Desa
4	Hariyanto	40 th	Perangkat Desa	8 th	Kepala Dusun
5	Darwoko	45 th	Perangkat Desa	4,5 th	Kaur Pemerintahan
6	Sukmawanto	38 th	Warga	-	Mantan Ketua LMD
7	Herry Cahyono	37 th	Perangkat Desa	5,5 th	Sekretaris Desa
8	Supriyanto	70 th	Perangkat Desa	32 th	Kaur Pemerintahan
9	Wasito	64 th	Perangkat Desa	26 th	Kaur Kesra
10	Suparno	48 th	Perangkat Desa	28 th	RW
11	Asik	36 th	Perangkat Desa	2 th	RT
12	Samsul Hadi Nasuhan	62 th	Dosen	40 th	Pensiunan PNS
13	Binti Nafiatin	50 th	Guru TK	28 th	Kepala TK
14	Eko Siswanto	24 th	Swasta	-	Warga

- b. Catatan lapangan adalah catatan hasil pengamatan langsung peneliti dan merupakan peran serta peneliti dalam situasi, proses dan perilaku yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud.
- c. Dokumentasi adalah data yang diperoleh peneliti melalui berbagai macam sumber, yaitu internet, buku jurnal, surat kabar maupun majalah yang berkaitan dengan tema yang peneliti kaji.

Penelitian ini diadakan di kecamatan Puncu dengan mengambil subyek penelitian 2 Desa. Pemilihan lokasi ini berdasarkan atas beberapa pertimbangan, yakni;

1. Desa Wonorejo merupakan desa yang heterogen baik dari segi etnis maupun dari segi sosial ekonomi. Dengan demikian penduduk kelurahan ini bisa mewakili sebagian desa di kecamatan Puncu.
2. Desa Gadungan merupakan desa yang mempunyai penduduk paling banyak dibanding dengan desa-desa lain di kecamatan Puncu, kemudian letaknya dekat dengan perkotaan (pinggiran), sehingga karakter masyarakat berbeda dengan masyarakat desa lain.
3. Lokasi penelitian tidak terlalu jauh dari tempat tinggal peneliti, sehingga memudahkan peneliti dalam mengamati kegiatan masyarakat.
4. Adanya keinginan dari peneliti untuk mengetahui lebih jauh tentang pola komunikasi Aparat terhadap masyarakat.

- 3) *Communicating* yakni setelah *planning* disusun maka tahap selanjutnya adalah *communicating/* komunikasi.
- 4) *Evaluation* yakni penilaian dan analisis kembali diperlukan untuk melihat bagaimana hasil komunikasi tersebut. Ini kemudian menjadi bahan bagi perencanaan melakukan komunikasi selanjutnya.

Masih melalui penuturan pak Nizam, dalam menjawab pertanyaan peneliti mengenai kemungkinan terjadinya *miscommunication*, hal ini sangat dijaga karena menyangkut pemerintahan, kesalahfahaman dalam komunikasi dengan cepat dihindari. Dan alhamdulillah jarang terjadi, tidak jauh beda dengan hambatan-hambatan komunikasi, meskipun ada namun aparat bersifat peka untuk tanggap dengan cepat mengatasinya.

Dibawah ini mengenai Mekanisme Kerja Tahunan untuk Pemerintah Desa.

Tabel 10

Mekanisme Kerja Tahunan untuk Pemerintah Desa

NO	BULAN/ TAHUN	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Oktober	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Program Kerja Tahunan Pemerintahan Desa Tahun yang akan datang 2. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Pemerintahan Desa Tahun yang akan datang. 	Pemdes dan BPD
2	Nopember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kerja Tahunan Pemerintahan Desa dan Berbagai Produk Hukum Pemerintahan Desa Tahun berjalan 2. Pekan Sosialisasi Program Kerja Pemerintah Desa dan Produk Hukum Pemerintah Desa Tahun yang akan datang. 	Pemdes Pemdes, BPD, dan

		3. Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran yang akan datang.	LMD Pemdes dan BPD
3	Desember	1. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan APBDes Tahun yang akan datang. 2. Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Desa yang terkait.	Pemdes dan BPD
4	Januari	1. Pelaksanaan Program Kerja dan APBDes Tahun berjalan. 2. Penyusunan Rancangan Perhitungan APBdes 3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Tahun lalu kepada Bupati.	Pemdes
5	Februari	Pembahasan perhitungan APBDes tahun yang lalu	Pemdes dan BPD
6	Maret	1. Penyampaian Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Bentuk Perhitungan APBDes Kepada Masyarakat Melalui BPD. 2. Penetapan Perhitungan APBDes tahun yang lalu 3. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Tahun lalu kepada Bupati.	Pemdes
7	April	Evaluasi Pendahuluan terhadap Pelaksanaan Program kerja Tahunan Desa, APBDes dan berbagai Peraturan Desa terkait.	Pemdes
8	Mei	1. Tilik Dusun 2. Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) dalam rangka Penyusunan Rencana Program Kerja Tahunan Desa (Rapertades)	Pemdes, BPD dan LMD
9	Juni	1. Evaluasi dan Penyusunan Rancangan Perubahan APBDes. 2. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program Kerja Tahunan Desa, APBDes dan berbagai Peraturan Desa terkait tahun berjalan.	Pemdes, BPD dan LMD
10	Juli	1. Penetapan Perubahan Apbdes (APK) Tahun Berjalan 2. Melaporkan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes (PAK) Tahun berjalan kepada Bupati.	Pemdes, BPD dan Pemdes
11	Agustus	Pelaksanaan Perubahan APBDes (PAK)	Pemdes
12	September	Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Program Kerja Tahunan Desa tahun yang akan datang.	Pemdes, BPD dan Elemen Kemasyarakatan yang lain.

bahasa. Metode yang digunakan adalah dua arah yakni, aparat menyampaikan program kerja ke perangkat desa, kemudian dilaksanakan oleh perangkat dan disampaikan pada masyarakat. Setiap satu bulan sekali pula laporan evaluasi kerja diberikan pada aparat kecamatan, sehingga aparat bisa mengetahui kekurangan dan masalah yang sedang dihadapi oleh perangkat serta bagaimana kondisi desa pada bulan tersebut.

Metode yang dipakai untuk masing-masing desa sama saja, seperti penjelasan diatas. Komunikasi dua arah melalui saluran ke bawah (top down), saluran ke atas (bottom up), sama-sama digunakan untuk menjaga agar tidak terjadi *misscommuniation*, maupun hambatan komunikasi. Ada lima jenis informasi yang biasa dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan (katz & kahn, 1966): (1) informasi mengenai bagaimana melakukan tindakan, (2) informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan, (3) informasi mengenai mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi, (4) informasi mengenai kinerja pegawai, dan (5) informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas (*sense of mission*).

Tindakan ini dilakukan karena tugas pemerintah dalam suatu daerah sangat penting dan aparat kecamatan berusaha agar hubungan kerja secara hierarkis ini terjaga dengan baik. Proses komunikasi antara aparat dengan perangkat desa bersifat koordinatif dan fasilitatif, aparat sebagai fasilitator bagi perangkat. Tapi tidak menjauhkan jarak bagi mereka untuk saling berkomunikasi dan saling membantu dalam hal kemajuan daerah.

Berdasarkan gambar di atas, model komunikasi lebih mengarah pada model Lasswell, seperti yang telah digambarkan diatas bahwa kepala desa berperan sebagai komunikator yang membawa pesan berupa informasi kerja desa melalui saluran bisa secara verbal yakni menggunakan bahasa atau nonverbal melalui gerak, sikap, kemudian disampaikan kepada komunikan yakni perangkat-perangkat desa sampai ke bawah, proses komunikasi ini bisa melalui pertemuan atau rapat kerja di balai desa. Selanjutnya oleh perangkat disampaikan pada masyarakat melalui petugas yang ada di dusun masing-masing.

Peran komunikator dalam hal ini penting, (perlu diketahui sebelumnya kepala desa Wonorejo berasal dari kaum perempuan dan sudah terpilih 2 periode) dimana ia mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Pesan sampai dari kepala desa kepada perangkat melalui saluran atau media yakni bahasa, penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, komunikator harus bisa membaca bahasa tubuh dari komunikan sehingga dia bisa meminimalisir kekurangan yang mungkin dilakukan. Pemahaman tentang latar belakang pengetahuan (*frame of knowledge*) dan kerangka pikir (*frame of reference*) dari masyarakat sangat penting, dengan begitu komunikasi bisa mengenai sasaran yang tepat.

Dari pengamatan peneliti hambatan komunikasi masih sering terjadi di desa ini, hal ini dikarenakan jarak antara dusun dengan dusun yang lain lumayan jauh, jarak ini dipisahkan oleh hutan kayu milik perhutani. Tapi dengan adanya suatu program kegiatan dari desa komunikasi dengan

Dari gambar di atas kita bisa lihat proses komunikasi terjadi antara perangkat desa dengan masyarakat. Kepala desa sebagai komunikator menyampaikan pesan/ informasi pada perangkat secara formal melalui rapat atau pertemuan penting desa. Model komunikasi disini lebih mengarah pada model milik Berlo.

Informasi yang disampaikan pada perangkat ini dapat berupa pesan verbal maupun nonverbal. Pesan verbal adalah semua jenis komunikasi lisan yang menggunakan satu kata atau lebih, bagi komunikator sebelum pesan disampaikan pada komunikan pesan dipersiapkan secara matang, ada tahapan yang harus dilaksanakan agar komunikasi bisa efektif, yaitu: *Fact finding*, *planning*, *communicating*, dan *evaluation*.

- 1) *Fact finding* adalah menyarikan dan mengumpulkan fakta dan data sebelum seseorang melakukan kegiatan komunikasi. Jadi disini tugas seorang komunikator (aparatur) adalah menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan sebelum pertemuan dimulai.
- 2) *Planning* yakni berdasarkan fakta dan data itu dibuatkan rencana tentang apa yang akan dikemukakan dan bagaimana mengemukakannya. Bagi suatu masyarakat yang agraris tentu saja pengemukakan komunikasi haruslah menggunakan cara yang sesuai dengan ciri-ciri agraris.
- 3) *Communicating* yakni setelah *planning* disusun maka tahap selanjutnya adalah *communicating*/ komunikasi.

baik, menguasai istilah-istilah umum yang digunakan oleh lingkungannya, mengurangi salah penafsiran ataupun hambatan lain. Memahami betul kerangka pikir (*frame of reference*) dan pengetahuan (*frame of knowledge*) masyarakat. Model komunikasi disini mengarah pad amodel Lasswell, karena dibutuhkan umpan balik dari masyarakat terhadap kinerja perangkat melalui tokoh masyarakat.

Selain itu komunikator harus bisa menempatkan diri sebagai komunikan (empati). Dengan karakter masyarakat desa Gadungan yang cuek, maka harus ada upaya pendekatan diri pada masyarakat untuk memperoleh kepercayaan dan memahami lebih jauh karakter masing-masing dusun. Karena selama ini di desa Gadungan pengaruh dan kepercayaan pada tokoh masyarakat masih tinggi jika dibandingkan perangkat.

Efek dari proses komunikasi bagi komunikan adalah melaksanakan pesan yang datang dari komunikator tersebut.

Adanya umpan balik dari masyarakat, situasi ketidakmenentuan dapat ditekan sekecil mungkin. Pemberi pesan atau penerima pesan selalu berusaha untuk memastikan bahwa pesan itu diterjemahkan sama oleh penerima (seperti yang dilakukan pak Herry, dengan jum'atan kelilingnya beliau bisa mengetahui penafsiran masyarakat terhadap informasi dari desa). Demikian juga dengan yang dilakukan oleh salah satu tokoh masyarkat pak Nasuhan, adanya rapat rutin perkumpulan takmir Masjid akan lebih mudah mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat dari setiap dusun.

Dilapangan pembagian kerja tampak jelas terlihat, para perangkat melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing, dan hal itu sudah menjadi bagian sendiri-sendiri, perangkat menguasai pekerjaan dibidangnya sendiri.

Ini yang menjadi ciri dalam birokrasi pemerintahan, tersusun dalam suatu struktur dengan pembagian kerja yang jelas dan sesuai dengan kemampuan pejabat. Deskripsi kerja (*job description*) tentu saja merupakan salah satu metode untuk memenuhi karakteristik ini. Garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan hierarkis. ruang lingkup kewenangan atasan atas bawahan secara tegas dibatasi. Konsep-konsep komunikasi ke atas (*bottom up*) dan komunikasi kebawah (*top down*) mencerminkan konsep kewenangan ini, dengan informasi yang mengalir ke bawah dari jabatan yang memiliki kewenangan lebih luas ke jabatan yang memiliki kewenangan lebih sempit.

Temuan teori pada lapangan, komunikasi mengalir secara structural, berjalan secara terarah dari atas ke bawah, secara global hampir sama dengan teori birokrasi dalam organisasi, perangkat bawah bertanggung jawab pada atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan perlu menjalin kerja sama dengan orang lain, dengan menjalin hubungan antarpribadi dengan perangkat maka kerja sama akan lebih mudah terjalin. Dimana proses komunikasi interpersonal merupakan modal dasar proses komunikasi antar manusia. Dalam komunikasi interpersonal dapat dirasakan bahwa proses

komunikasi adalah proses yang dinamis dalam saling tukar informasi antara dua individu.

Efektif tidaknya suatu kegiatan komunikasi bergantung dari ketepatan penggunaan kata-kata atau kalimat dalam mengungkapkan sesuatu. Proses komunikasi dapat berlangsung dengan baik bila komunikan dapat menafsirkan secara tepat makna pesan yang disampaikan oleh komunikator baik dengan menggunakan bahasa maupun surat perintah.

Di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hubungan antar pribadi memainkan peranan penting dalam membentuk kehidupan masyarakat, terutama ketika hubungan antarpribadi itu mampu memberi dorongan kepada orang tertentu yang berhubungan dengan perasaan, pemahaman informasi, dukungan, dan berbagai bentuk komunikasi yang mempengaruhi citra diri orang serta membantu orang untuk saling memahami.

Dalam masyarakat ada pengendalian pada perubahan perilaku setelah memperoleh informasi dari perangkat, secara psikologis ada sistem pencernaan pesan dalam otak yang kemudian disampaikan melalui tindakan. Seperti digambarkan pada model komunikasi Berlo ada beberapa factor pribadi yang mempengaruhi proses komunikasi, yakni ketrampilan berkomunikasi, pengetahuan, system social dan lingkungan budaya dari komunikator maupun komunikan. Kemudian hal inilah yang nantinya mempengaruhi perilaku si komunikan setelah menerima informasi.

Konsep tentang sikap merupakan konstruk dari tindakan yang akan dilakukan oleh masyarakat sebagai sasaran komunikasi, perubahan perilaku ini

bisa menjadi acuan dalam melihat hasil dari proses komunikasi yang telah dilakukan oleh perangkat. Sehingga nantinya pola komunikasi dalam masyarakat akan terbentuk dengan adanya partisipasi dan pelaksanaan atas kegiatan yang telah disosialisasikan oleh pemerintah.

diharapkan tetapi dengan keikhlasan, pasti Allah SWT, akan memberi dengan yang lebih baik. Perangkat hendaknya lebih sering mendengarkan keluhan, aspirasi dari masyarakat dengan begitu akan lebih mudah bagi perangkat untuk menjalankan roda pemerintahan, karena dari situlah masukan dari masyarakat bawah yang telah merasakan bagaimana pola pemerintahan selama ini, intinya sesuatu yang baik untuk kesejahteraan mereka saat ini dan selanjutnya.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dibidang studi komunikasi dan sebagai bahan pertimbangan untuk bacaan atau referensi bagi semua pihak. Khususnya bagi Prodi Komunikasi Fakultas Dakwah merupakan sumbangan teoritis dalam bidang model komunikasi pemerintahan dan masyarakat di kecamatan Puncu kabupaten Kediri.
4. Adanya pemerintahan di daerah adalah dengan tujuan yang sudah diatur oleh pemerintahan pusat. Aparat di daerah menjalankan tugas dan fungsinya untuk daerah yang ia bina, ia memiliki arti penting dalam berlangsungnya pembangunan dan kemajuan daerah. Oleh karena itu, sebuah organisasi pemerintahan perlu dibangun di atas dasar system interaksi yang kondusif, dengan mamahami lingkungan dan makna dari kerja sama maka komunikasi efektif akan tercapai.

